

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Teori Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

- a. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:
  - 1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM.
  - 2) peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.
  - 3) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
- c. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh

dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.<sup>1</sup>

## **2. Konsep Negara Kesejahteraan**

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh Otto van Bismark tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.<sup>2</sup> Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfare staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. M. Solly Lubis menyatakan bahwa "Dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun *administrative state*".<sup>4</sup> Negara sebagai *political state* pemerintah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu: (i) Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance peace and order*) yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun dari sumber-sumber lain; (ii) fungsi pertahanan dan keamanan; (iii) fungsi diplomatik, dan (iv) fungsi perpajakan.<sup>5</sup>

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebaskan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, dimana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.

Kuntjoro Purbopranoto, memerinci kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>1</sup> <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

<sup>2</sup> Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Yellow printing, Jakarta, h. 36.

<sup>3</sup> Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, h. 55

<sup>4</sup> M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Mandar Maju, Bandung, 1992.h.117.

<sup>5</sup> Safri Nugraha. et.all, 2007. Hukum Administrasi Negara. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta, h. 81.

<sup>6</sup> Kuntjoro Purbopranoto. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 39

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa.

Brown, berpandangan bahwa:

Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik.<sup>7</sup>

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>8</sup> Karena itu negara diberikan kewenangan aktif sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*), atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (*social service state*), atau negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

### **3. Konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Awalnya konsep ini dirumuskan dalam Laporan Bruntland (*Bruntland Report*) sebagai hasil kongres Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987. Secara sederhana dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan (memenuhi)

---

<sup>7</sup> <sup>11</sup> Safri Nugraha. et.all. Op. Cit, h. 82

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. et.all. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 27

<sup>11</sup> Faried Ali, dkk, Studi Analisa Kebijakan, Konsep Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah, 2012, Refika Aditama, Bandung, hal 65- 67

kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus sudah memikirkan pula kebutuhan hidup generasi berikutnya. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan disemua aspek kehidupan manusia, maka pada tahun 1992, semua pemimpin dunia bertemu dalam konferensi dunia di Rio de Janeiro, Brasil yang membahas konsep pembangunan berkelanjutan untuk semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang terkenal dengan nama Agenda 21. Salah satu agenda 21 yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian adalah program Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD). Pesan moral untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik untuk semua generasi ini diterima secara universal oleh pemimpin dunia, sehingga pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Pendekatan dan praktek pertanian konvensional yang dilaksanakan di sebagian besar negara maju dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Untung K., 2006). Pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman benih/ varietas tanaman unggul secara seragam spasial dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia (pupuk dan pestisida), dan alat mesin pertanian.

Menurut perhitungan ekonomi memang penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari praktek pertanian konvensional tersebut ternyata pada sebagian wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti banyak dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat serta pakar ekonomi dan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Salim, E. (2011), eksploitasi sumber daya alam oleh kegiatan pembangunan perkebunan dan pertambangan telah melebihi kapasitas daya dukung ekologis (*carrying capacity*), sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat semakin meragukan masyarakat dunia akan keberlanjutan ekosistem pertanian dalam menopang kehidupan manusia pada masa mendatang.

Globalisasi ekonomi telah berdampak pada suatu keharusan bahwa pada pola pendekatan pembangunan pertanian ke depan, diarahkan kepada “Paradigma Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan” yang berada dalam konteks pembangunan manusia. Paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan sendiri, dengan memperhatikan potensi kelestarian lingkungannya (Sumodiningrat, 2000). Makalah ini mendiskusikan tentang konsep, komitmen dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Istilah pembangunan berkelanjutan yang dalam bahasa Inggris disebut “sustainable development” diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1980. Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dan program aksi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian KTT Johannesburg selain mencanangkan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional, juga telah meletakkan dasar-dasar yang patut dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan dan sektor atau aspek pembangunan.

Sejak awal 1980-an bertepatan dengan dikeluarkannya Dokumen Strategi Konservasi Bumi (*World Conservation Strategy*) oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*), telah banyak dimunculkan berbagai definisi tentang pembangunan berkelanjutan oleh para pakar maupun organisasi keilmuan. Namun definisi yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional adalah definisi yang disusun oleh Bruntland Commission, yakni pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987 dalam Dahuri, 1998).

#### **4. Teori Efektifitas Hukum**

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, Seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektivikasi kaidah-kaidah hukum tersebut. Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivikasi hukum merupakan pembahasan mengenai sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Dapat dikatakan bahwa salah satu pengaruh hukum adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Oleh karena itu maka masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif

artinya wujud kepatuhan ataupun ketidaktaatan. (Soerjono Soekanto 1985:4).<sup>9</sup>

Pengaruh dari hukum terhadap suatu sikap ketaatan manusia terhadap hukum kadang-kadang dapat diukur secara kuantitatif dengan catatan bahwa hasil pengukurannya tidak selamanya akan dapat diterapkan secara umum, artinya hasil pengukurannya tersebut dalam batas-batas tertentu sifatnya relatif. Pengaruh hukum tersebut dapat disusun dalam bentuk suatu skala mulai dengan pengaruh positif yang sempurna sampai dengan pengaruh negatif yang sempurna pula yang disusun dalam tingkat kepatuhan-kepatuhan serta ketidaktaatan tertentu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka untuk menciptakan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia adalah sebagai berikut :

**a. Hukum harus dapat dikomunikasikan**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental (pre disposition), sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan padangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Dengan demikian, maka sikap mempunyai komponen kognitif (menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya antara lain mencakup pengetahuan), afektif (berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang), maupun konatif (berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau untuk berbuat terhadap sesuatu) Ketiga komponen tersebut berkait erat dengan komunikasi hukum. Dalam komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan untuk mengadakan komunikasi secara langsung. Dalam hal ini perlu diperhatikan tehnik-tehnik seorang komunikator yang akan dilakukan terutama tentang kepercayaan, daya tarik dan kewibawaannya. Cara yang dapat dilakukan :
  - a) persuasi
  - b) pemberian sugesti
  - c) diskusi
  - d) penumbuhan konformitas
  - e) indoktrinasi
- 2) Besar-kecilnya jumlah penerima pesan atau audience; semakin kecil jumlah penerima pesan semakin efektif komunikasi hukum tersebut.
- 3) Isi pesan adalah sekhusus mungkin; dalam hal ini sebaiknya digunakan jalan pikiran yang induktif.
- 4) Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.
- 5) Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya. Sebaiknya dipergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan (kalau perlu penggunaan bahasa disesuaikan daerah termasuk logat-logatnya)

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Bandung, halaman 4

**b. Disposisi untuk berperilaku**

Hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Kadang-kadang seseorang mematuhi hukum agar supaya hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, tetap terpelihara, orang patuh dengan hukum juga kadang disebabkan adanya tekanan pihak lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:<sup>10</sup>

Faktor Hukumnya sendiri merupakan perwujudan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

- 1) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 2) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 3) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam sebuah realitas lapangan atau fenomena terkait dengan implementasi hukum ada 3 elemen yang penting sebagai berikut :

- 1) Struktur Sistem Hukum (Struktur of Legal System), dalam hal ini struktur yang dimaksud antara lain Pemerintah Pusat, Kontraktor Kontrak Kerjasama, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta instansi lain atau stake holder terkait.
- 2) Substansi Sistem Hukum (Substance Of Legal System) dalam hal ini substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Budaya hukum masyarakat (Legal Culture), dalam hal ini budaya yang dimaksud antara lain seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dan hidup dalam perilaku masyarakat

**B. Praktek Empiris**

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke- 10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknnya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor *Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Garfindo Persada , Jakarta, Halaman 8

Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

### **1. Batas dan Luas Wilayah**

Kabupaten Tana Tidung dengan posisi astronomis terbentang mulai 116°42'50" sampai dengan 117°49'50" Bujur Timur dan 3°12'02" sampai dengan 3°46'41" Lintang Selatan (RKPD Kab. Tana Tidung, 2020), mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulungan, Laut Sulawesi Kota Tarakan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah 4.828,58 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Muruk Rian, Sesayap, Betayau, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sesayap Hilir merupakan kecamatan terluas yang mencapai 27,29% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung, sedang kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu Muruk Rian dengan luasan 60.862 ha atau 12,60% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Terdapat sebanyak 32 desa di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar di masing-masing kecamatan dengan jumlah desa di masing-masing kecamatan berkisar dari 5 – 8 desa, terbanyak di kecamatan Sesayap Hilir dan paling sedikit di Kecamatan Tana Lia. Jumlah desa serta luas dan persentase wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Jumlah Desa<sup>1</sup>, Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas		
			(km <sup>2</sup> )	(ha)	(%)
1	Muruk Rian	6	608,62	60.862	12,60
2	Sesayap	7	1.016,92	101.692	21,06
3	Betayau	6	1.007,65	100.765	20,87
4	Sesayap Hilir	8	1.317,53	131.753	27,29
5	Tana Lia	5	877,86	87.786	18,18
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>4.828,58</b>	<b>482.858</b>	<b>100,00</b>

*Keterangan : <sup>1</sup>Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)  
Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung, 2020*

### **2. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng (Topografi)**

Ketinggian wilayah di Kabupaten Tana Tidung berkisar dari 0 hingga 1.000 m dari permukaan laut (m dpl). Ketinggian 7 – 25 m dpl merupakan yang terluas yaitu 246.733 ha atau sekitar 79,80 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Luas wilayah dan persentase luas wilayah menurut ketinggian tempat di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2.** Kelas Ketinggian Tempat dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Ketinggian Tempat (m dpl)	Luas Wilayah (ha)	Persentase Ketinggian (%)
1	0 – 7	11.034	3,57
2	7 – 25	246.733	79,80
3	25 -100	51.029	16,51
4	100 – 500	22	0,01
5	500 - 1.000	302	0,10
6	➤ 1.000	0	0,00

Sumber :RKPD Kab. Tana Tidung , 2021

Kemiringan wilayah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tana Tidung (2021) didominasi oleh topografi lahan datar sampai dengan landai dengan luas mencapai 4.426,578 km<sup>2</sup> atau sekitar 91,69 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Adapun lahan dengan topografi berombak sekitar 101,395 km<sup>2</sup> (2,10%), lahan dengan topografi bergelombang sekitar 25,368 km<sup>2</sup> (0,52%), lahan dengan topografi berbukit sekitar 271.192 km<sup>2</sup> (5,62%) dan lahan dengan topografi bergunung sekitar 3,467 km<sup>2</sup> (0,07%). Kelas kemiringan lahan (topografi) lahan Kabupaten Tana Tidung secara rinci disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.** Kelas Kemiringan Lahan (Rata-Rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
1	Datar-landai	4.426,578	91,69
2	Berombak	101,395	2,10
3	Bergelombang	25,368	0,52
4	Berbukit	271,192	5,62
5	Bergunung	3,467	0,07
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,000</b>	<b>100,00</b>

Sumber :RKPD Kab.Tana Tidung. 2021

### 3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunung api ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar.

Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang

dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatannya sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatannya logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi.

Dengan kondisi tersebut mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatannya minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung (RKPD Kab. Tana Tidung, 2021).

Geologi Kabupaten Tana Tidung tersusun dari 11 litologi. Sebagian besar geologi tersebut berupa Aluvium yaitu berupa batuan endapan yang merupakan kombinasi dari bahan-bahan Pasir, debu, kerikil, bongkahan lepas dan gambut. Litologi pembentuk geologi beserta luasannya di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.** Litologi Penyusun Geologi Kabupaten Tana Tidung

No	Litologi	Luas (ha)
1	KTme (Formasi Mentarang K.Embaluh)	10.549,07
2	Mzb (Formasi Bengara)	1.830,63
3	Qa (Aluvium)	110.866,53
4	Qat (Aluvium Terbiku)	155.270,75
5	Tes (Formasi Sembakung)	16.403,63
6	Tma (Formasi Malinau)	526,58
7	Tmb (Formasi Besar)	4.229,02
8	Tmt (Formasi Citarate)	23.385,86
9	Tomj ( Batuan Gunung Api Jelai)	8.647,48
10	Tps (Formasi Seurela)	2.541,81
11	TQps ( Formasi Sajau)	2.927,85

#### **4. Nama dan Luas Pulau**

Di wilayah Kabupaten Tana Tidung selain terdapat di daratan Pulau Kalimantan juga mempunyai wilayah yang berupa pulau. Terdapat 39 pulau di Kabupaten Tana Tidung. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul yang mempunyai luas 35.291,76 ha yang terdapat di Kecamatan Tana Lia. Setelah itu Pulau Mangkudulis Besar dengan luasan 26.127,22 ha yang juga termasuk dalam wilayah administrasi Tana Lia.

**Tabel 2.5.** Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Tana Tidung

No.	Nama Pulau	Luas (ha)	No.	Nama Pulau	Luas (ha)
1.	Baru	92,78	21.	Sebidai Selatan	46,08
2.	Baru Lumot	81,95	22.	Sebidai Utara	18,96
3.	Bekaro	102,80	23.	Sekabat	51,50
4.	Bengkalung	184,65	24.	Sekapal	84,46
5.	Fani	264,02	25.	Sengato	3.484,85
6.	Ijap	2.883,18	26.	Sengato Tengah	88,47
7.	Iting-iting	972,08	27.	Sepakang	13,61
8.	Kranggasan Barat	355,40	28.	Sesayap	119,83
9.	Kranggasan Timur	331,24	29.	Siambun	74,53
10.	Linuang Bujung	1.908,88	30.	Sida	4.598,80
11.	Lisan	17,72	31.	Singa	78,19
12.	Mandul	35.291,76	32.	Sumbing	76,83
13.	Mandul Lumot	3.397,90	33.	Tembalang	220,58
14.	Mangkudulis Besar	26.127,22	34.	Tembangan	1.150,86
15.	Mangkudulis Kecil	3.942,14	35.	Tempodus	48,91
16.	Mengkasak	1.696,90	36.	Tengku Dacing	1.760,39
17.	Mensatul	851,90	37.	Tiga	516,86
18.	Saka	19,50	38.	Tiram	29,84
19.	Sapunti	147,88	39.	Umbus	38,2
20.	Sebidai	173,16			

Sumber : RKPД Kab. Tana Tidung , 2021

## 5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Tana Tidung didasarkan dari hidrologinya terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu : 1) Betayau, 2) Linuang Kayam, 3) Payau, 4) Sembakung, 5) Sesayap dan 6) Simbawang.

Berdasarkan luasannya maka DAS Sesayap merupakan yang terluas yaitu 145.510,24 ha. DAS ini menempati lokasi disekitar Sungai Sesayap, yaitu sungai yang terpanjang di Kabupaten Tana Tidung dengan panjang sekitar 270 km (Termasuk Wilayah Kabupaten Malinau). Luasan masing-masing DAS di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan dari interpretasi Peta DAS yang bersumber dari peta RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.** Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung

No	Nama DAS	Luas (ha)
1	Betayau	86.809,24
2	Linuang Kayam	34.410,04

3	Payau	3.601,69
4	Sembakung	46.370,33
5	Sesayap	145.510,24
6	Simbawang	27.566,48

Berdasarkan geohidrologi, Kabupaten Tana Tidung dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Daerah air tanah langka/tidak berarti seluas 20.948,20 ha, 2) Produktivitas akuifer rendah dengan luas 37.363, 51 ha dan 3) Setempat akuifer produktif seluas 295.505,40 ha. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung mempunyai akuifer produktif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan.

#### **6. Jenis Tanah**

Di Kabupaten Tana Tidung, terdapat lima ordo tanah menurut sistem klasifikasi tanah USDA, yaitu : 1) Inseptisol, 2) Vertisol, 3) Entisol, 4) Ultisol dan 5) Histosol yang terbagi dalam sembilan great group.

Ultisol merupakan jenis tanah terluas di Tana Tidung yaitu 119.305,13 ha yang terbagi dalam dua great group yaitu Tropaquults dan Tropodults. Jenis tanah lain yang sebarannya sangat luas adalah Entisol dan Vertisol, masing-masing dengan luas 103.499,44 ha dan Vertisol dengan luas 71.702,64. Bila dilihat dari great group maka jenis tanah yang paling luas yaitu Tropodults yaitu 98.940,77 ha, yang diikuti oleh Ultipsamments yaitu 96.019,79 ha. Luasan jenis tanah di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7.** Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Tana Tidung

<b>No</b>	<b>Ordo Tanah</b>	<b>Great Group</b>	<b>Luas (ha)</b>
1	Inseptisol	Dystropepts	9.619,33
		Tropaquepts	378, 22
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>9.997,55</b>
2	Vertisol	Hydraquerts	71.702,64
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>71.702,64</b>
3	Ultisol	Tropaquults	20.364,36
		Tropodults	98.940,77
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>119.305,13</b>
4	Entisol	Tropopsamments	1.140,95
		Ultipsamments	96.910,79
		Fluvaquents	5.447,70
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>103.499,44</b>
5	Histosol	Troposaprists	29.024,62
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>29.024,62</b>

Sumber : Hasil Perhitungan dari Peta Jenis Tanah Kab. Tana Tidung

## **7. Klimatologi**

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan tahun 2020 yang dikutip dalam Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2021 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021), diperoleh kondisi unsur-unsur iklim sebagai berikut :

- Suhu udara berkisar dari yang terendah pada bulan Januari yaitu 22,80 °C dan tertinggi pada bulan Mei dan Juni yaitu 35,5 °C. Suhu rata-rata terendah yaitu 27,06 °C pada bulan Juli dan tertinggi yaitu 28,17 pada bulan Mei.
- Kelembaban udara paling rendah yaitu 44,00 % pada bulan Mei dan tertinggi yaitu 100,00 % pada bulan Juli, Agustus dan November. Kelembaban rata – rata terendah pada bulan April yaitu 83,47% dan tertinggi pada bulan Juli yaitu 87,00%.
- Kecepatan angin maksimum paling rendah pada bulan Agustus yaitu 7,72 knot dan tertinggi pada bulan Maret yaitu 20,58 knot.
- Tekanan udara paling rendah pada bulan Mei dan November yaitu 1.003,2 mb dan tertinggi pada bulan Februari yaitu 1.015,3 mb.
- Jumlah curah hujan tahun 2020 adalah 2.779,6 mm sehingga curah hujan rata-rata bulanan 231,63 mm. Curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni yaitu 131,1 mm dan tertinggi pada bulan Desember yaitu 492,1 mm.
- Jumlah hari hujan tahun 2020 sebanyak 247 hari dengan hari hujan paling rendah pada bulan April yaitu 16 hari dan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 23 hari.
- Rata-rata harian penyinaran matahari berkisar dari yang paling rendah yaitu 57,54% pada bulan September dan 86,94% pada bulan April

**Tabel 2.8.** Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)			Jumlah Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (%)
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks			
Januari	22,80	27,11	34,80	53,00	86,58	99,00	-	1,27	12,35	1.005,2	1.010,08	1.015,0	257,3	21	59,45
Februari	23,00	27,34	35,10	51,00	83,98	98,00	-	1,64	8,23	1.006,2	1.011,06	1.015,3	229,7	22	62,81
Maret	23,60	27,42	34,00	46,00	85,90	99,00	-	1,62	20,58	1.006,0	1.010,23	1.014,5	246,7	20	69,49
April	23,80	28,03	34,30	52,00	83,47	98,00	-	1,67	8,23	1.005,3	1.010,04	1.014,2	156,2	16	86,94
Mei	23,90	28,17	35,50	44,00	85,56	99,00	-	1,28	10,80	1.003,2	1.009,05	1.014,6	171,1	19	67,58
Juni	23,60	27,37	35,50	52,00	86,93	99,00	-	1,25	8,75	1.005,1	1.009,07	1.012,4	131,1	20	55,10
Juli	23,00	27,06	34,20	57,00	87,00	100,00	-	1,14	8,75	1.004,3	1.008,37	1.012,1	235,2	22	69,21
Agustus	23,00	27,89	35,30	53,00	83,73	100,00	-	1,14	7,72	1.004,1	1.008,74	1.013,1	180,0	21	84,17
September	23,20	27,29	34,60	53,00	86,27	99,00	-	1,41	13,38	1.003,5	1.008,79	1.012,7	135,3	21	57,54
Oktober	23,00	27,34	35,40	51,00	86,53	98,00	-	1,44	14,40	1.003,2	1.008,01	1.014,0	381,6	23	63,71
November	23,20	27,63	34,20	56,00	85,16	100,00	-	1,30	8,23	1.004,2	1.008,65	1.013,2	163,3	21	69,09
Desember	22,70	27,14	34,80	51,00	86,95	99,00	-	1,07	12,35	1.003,0	1.007,79	1.011,5	492,1	21	55,19

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021)

Kondisi unsur-unsur iklim di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

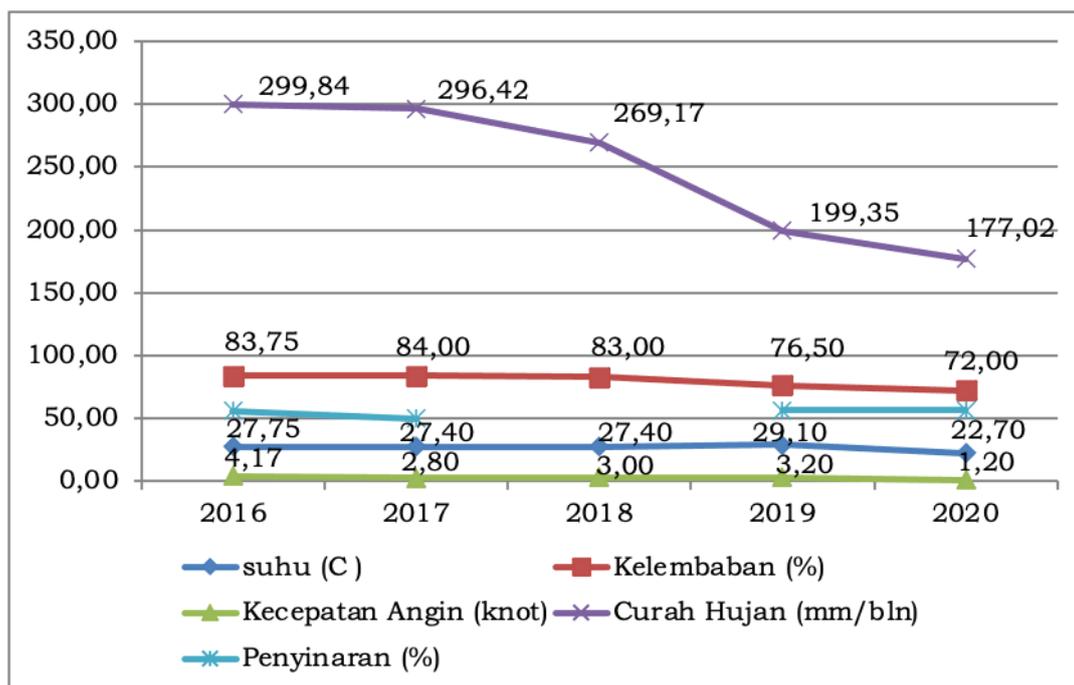
**Tabel 2.9.** Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020

Uraian	Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)					
– Maksimum	34,00	32,4	32,4	34,3	35,5
– Minimum	23,70	24,1	24,0	23,8	22,7
– Rata-rata	27,75	27,4	27,4	29,1	29,1
Kelembaban Udara (%)					
– Maksimum	86,00	86,0	95,0	97,0	100,0
– Minimum	81,00	82,0	67,0	56,0	44,0
– Rata-rata	83,75	84,0	83,0	76,5	72
Tekanan Udara (mb)	1.009,83	1.009,4	1.009,4	1.010,0	1.009,2
Kecepatan Angin (knot)	4,17	2,8	3,0	3,2	1,2
Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	3.598,10	3.557,0	3.230,0	2.392,2	2.124,2
Penyinaran Matahari (%)	55,75	50,0	-	56,6	56,3

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung., 2017 - 2021

Berdasarkan data perkembangan rata-rata iklim sebagaimana tabel di atas, memperlihatkan bahwa perkembangan curah hujan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 curah hujan rata-rata di Kabupaten Tana Tidung sebesar 299,84 mm/bulan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 177,02 mm/bulan. Demikian pula dengan kelembaban, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari.

Kelembaban udara pada tahun 2016 sebesar 83,75 % dan pada tahun 2020 turun menjadi 72,00 %. Kecepatan angin pada tahun 2016 sebesar 4,17 knot dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,2 knot. Adapun penyinaran matahari pada tahun 2016 sebesar 55,75 % dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,30 %. Trend perkembangan rata-rata iklim di Kabupaten Tana Tidung secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1.** Trend Perkembangan Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020

Berdasarkan peta curah hujan dari RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 maka ada tiga zonasi curah hujan di Kabupaten Tana Tidung yaitu : 1) Curah hujan 2.500 – 2.700 mm/tahun seluas 1.023,57 yang terjadi di Pulau Sekabat Kecamatan Tana Lia, 2) Curah hujan 2.800 – 3.100 mm/tahun seluas 167.036,92 ha dan 3) Curah hujan 3.100 – 3.400 mm/tahun seluas 164.257,98 ha. Berdasarkan data curah hujan tersebut maka curah hujan di Kabupaten Tana Tidung sangat tinggi dalam satu tahunnya yaitu minimal 2.700 mm, bahkan curah hujan yang dominan adalah lebih dari 2.800 mm/tahun.

### 8. Karakteristik Penggunaan Lahan

Hutan rawa sekunder merupakan penggunaan lahan yang paling luas di Kabupaten Tana Tidung, yang mencapai 505,05 km<sup>2</sup> atau 24,09% dari luas lahan di Kabupaten Tana Tidung. Penggunaan lahan lain yang cukup luas berupa semak belukar rawa dan hutan lahan kering sekunder. Dalam hal penggunaan lahan yang berupa aktivitas ekonomi maka tambak merupakan yang paling luas. Penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 2.10.** Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung, 2018

Tutupan Lahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas (ha)	Persentase (%)

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

1	Hutan Lahan Kering Primer	158,95	15.895	3,29
2	Hutan Lahan K. Sekunder	897,66	89.766	18,59
3	Hutan Mangrove Primer	9,76	976	0,20
4	Hutan Mangrove Sekunder	102,40	10.240	2,12
5	Hutan Rawa Primer	122,49	12.249	254
6	Hutan Rawa Sekunder	505,00	50.500	1046
7	Hutan Tanaman	5,24	524	0.11
8	Lahan Terbuka/Kosong	23,33	2.333	0,48
9	Pemukiman	24,78	2.478	0,51
10	Perkebunan	812,76	81.276	16,83
11	Pertambangan	59,86	5.986	1,24
12	Pertanian L.K. Campur Semak	68,18	6.818	1,41
13	Semak Belukar	470,16	47.016	9,74
14	Semak Belukar Rawa	840,61	84.061	17,41
15	Tambak	727,40	72.740	15,06
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,58</b>	<b>482.858</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RKPD Kab. Tana Tidung , 2021

## 9. Pola Ruang (RTRW)

Terdapat 16 pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tana Tidung 2012 – 2032, namun tiga yang dominan yaitu : 1) Perkebunan (81.446,49 ha), 2) Hutan Produksi tetap (65.229,35 ha) dan 3) Tambak (62.018,81 ha). Bila lebih spesifik maka kegiatan perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pola ruang di Kabupaten Tanah Tidung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11.** Pola Ruang di Kabupaten Tana Tidung

No	Pola Ruang	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	165.229,35
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	9.421,21
3	Hortikultura (HR)	3.702,63
4	Perkebunan (KBN)	81.446,49
5	Kawasan Industri Skala Sedang (KI)	211,33
6	Kawasan Kantor Pemerintahan (KP)	15.743,46
7	Pertanian Lahan Basah (LB)	25.409,70
8	Pertanian Lahan Kering (LK)	12.545,05
9	Pariwisata Buatan (PB)	329,32

10	Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	9.257,92
11	Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)	8.169,58
12	Tambak (TAM)	62.018,81
13	TPI	22,75
14	Peternakan (TR)	260,55
15	Kawasan Lindung	20.352,09
16	Kawasan Peruntukan Lainnya	240,28

### **10. Kawasan Hutan**

Berdasarkan status kawasan hutan, wilayah Kabupaten terbagi menjadi : 1) Hutan Produksi Tetap (HP), 2) Hutan Produksi Terbatas (HPT), 3) Areal Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan 4) Tubuh Air. Hutan Produksi Tetap mencakup seluruh wilayah Kecamatan Muruk Rian, sebagian besar wilayah Kecamatan Betayau dan sebagian wilayah Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir. Hutan Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Tana Lia khususnya di bagian tengah Pulau Mandul. Untuk APL/KBNK terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Betayau.

### **11. Tutupan Lahan**

Tutupan lahan paling luas di Kabupaten Tana Tidung adalah hutan lahan kering sekunder yaitu 82.970,26 ha. Hutan lahan kering sekunder merupakan lahan kering yang berupa hutan muda yang umumnya ditumbuhi vegetasi pohon yang berukuran kecil. Mengingat bahwa hutan sekunder terbentuk karena adanya aktivitas pada hutan primer yang diantaranya disebabkan adanya kegiatan/aktivitas ekonomi seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan dan lain-lain. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah berupa sungai karena memang wilayah Kabupaten Tana Tidung terdapat beberapa sungai, yang terbesar dan terpanjang adalah Sungai Sesayap. Maraknya kegiatan perkebunan juga nampak dari tutupan lahan yang mencapai 66.875,52 ha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit yang dominannya berupa PBS dan sebagian adalah kebun masyarakat. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah hutan rawa sekunder yaitu 58.734,44 ha yang terdapat dilahan basah dengan ekosistem gambut yang mendapat tekanan kuat sehubungan dengan aktivitas manusia yang bermotif ekonomi. Padahal lahan gambut bersifat fragil atau mudah rusak. Luas tutupan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.12

**Tabel 2.12.** Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

<b>No</b>	<b>Tutupan Lahan</b>	<b>Luas (ha)</b>
1	Danau/Situ	215,63
2	Gardu Induk	1,87

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

3	Hutan Lahan Kering Primer	5.587,15
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.970,26
5	Hutan Mangrove Primer	13.461,17
6	Hutan Mangrove Sekunder	140,48
7	Hutan Rawa Primer	18.962,22
8	Hutan Rawa Sekunder	58.734,44
9	Hutan Tanaman	7.111,83
10	Perkebunan/Kebun	66.875,52
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	989,49
12	Sawah	153,69
13	Semak Belukar	20.856,04
14	Sungai	72.549,04
15	Tambak	42.866,98
16	Tambang	4.490,77
17	Tanah Kosong/Gundul	263,89
18	Tegalan/Ladang	805,04

## 12. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Kabupaten tahun 2020 sebanyak 25.884 jiwa, dengan kepadatan penduduk 6,30 jiwa/km<sup>2</sup>. Sesayap merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 10.489 jiwa yang mempunyai kepadatan penduduk 26,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya kecamatan Muruk Rian mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 1.483 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3,37 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.13.** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung, 2020

	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Muruk Rian	1.483	5,80	3,70
2	Sesayap	10.489	41,00	26,63
3	Betayau	2.834	11,08	4,90
4	Sesayap Hilir	7.441	29,08	3,96
5	Tana Lia	3.337	13,04	4,35
	<b>Jumlah</b>	<b>25.884</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

### **13. Jumlah Penduduk yang Tergolong Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang tergolong angkatan kerja dibedakan menurut tingkat pendidikannya yaitu : 1) Setingkat Sekolah Dasar (SD), 2) Setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3) Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4) Setingkat Perguruan Tinggi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan setingkat SMA yaitu mencapai sekitar 4.629 jiwa yang terdiri atas penduduk yang bekerja sebanyak 4.359 jiwa dan pengangguran 270 jiwa. Jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah adalah 11.311 jiwa atau 79,76% dari total angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung. Bila dirinci lebih lanjut maka dari 11.311 jiwa angkatan kerja tersebut maka 10.701 jiwa atau 94,61% bekerja dan 610 jiwa atau 5,39% menganggur.

Secara keseluruhan dari penduduk usia angkatan kerja, terdapat 5,08% masih menganggur. Artinya satu dari 20 orang angkatan kerja menganggur. Pengangguran itu terjadi pada seluruh tingkatan pendidikan dan kedepan harus dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Misalnya melalui pengembangan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru atau pembinaan dan pemberdayaan wirausaha masyarakat sehingga terjadi peningkatan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mengurangi pengangguran.

Sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung yang masuk kategori angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14.** Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Kategori Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (jiwa), 2020

Tingkat Pendidikan		Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
1	SD/Sederajat	4.254	258	4.512
2	SMP/Sederajat	2.088	82	2.170
3	SMA/Sederajat	4.359	270	4.629
4	Perguruan Tinggi	2.795	75	2.870
<b>Jumlah</b>		<b>13.496</b>	<b>685</b>	<b>14.181</b>

*Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021*

### **14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan**

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 20.914 jiwa, terdiri dari 14.181 jiwa merupakan angkatan kerja dan 6.733 jiwa adalah bukan angkatan kerja. Sebagian besar dari penduduk yang tergolong angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja dan sebagian lainnya merupakan pengangguran. Sedang untuk

penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, sebagian besar mengurus rumah tangga.

**Tabel 2.15.** Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jumlah (jiwa)	%
<b>Angkatan Kerja (AK)</b>	<b>14.181</b>	<b>67,81</b>
➤ Bekerja	13.496	64,53
➤ Pengangguran	685	3,28
<b>Bukan Angkatan Kerja (BAK)</b>	<b>6.733</b>	<b>32,19</b>
➤ Sekolah	1.134	5,42
➤ Mengurus Rumah Tangga	4.781	22,86
➤ Lainnya	818	3,91
<b>Jumlah</b>	<b>20.914</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

## 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur tahun 2020, memperlihatkan bahwa penduduk Kabupaten Tana Tidung didominasi usia produktif (15 s/d 59 Tahun) yaitu mencapai 17.070 jiwa atau sekitar 67% dari penduduk Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan penduduk yang masuk usia tidak produktif karena sudah tua (lansia) sekitar 1.478 jiwa atau sekitar 5,8 %. Adapun kelompok umur yang masih tergolong usia balita dan anak-anak sekitar 7.036 jiwa atau sekitar 28,0%.

Cukup banyaknya penduduk yang berusia 15 – 19 tahun dan 20 – 24 tahun patut mendapat perhatian terutama menyangkut ketersediaan lapangan kerja/usaha untuk mengakomodasi kebutuhan misal saat mereka lulus SLTA atau perguruan tinggi. Bila tidak diperhatikan diantisipasi maka kemungkinan bisa terjadi peningkatan pengangguran.

Adapun sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020 seperti pada Tabel 2.16.

**Tabel 2.16.** Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa), 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan		
1	0 – 4	1.282	1.195	2.477
2	5 – 9	1.159	1.159	2.318
3	10 – 14	1.153	1.088	2.241
4	15 – 19	1.181	1.041	2.222
5	20 – 24	1.123	989	2.112

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

6	25 – 29	1.114	1.062	2.176
7	30 – 34	1.206	1.226	2.432
8	35 – 39	1.236	1.023	2.259
9	40 – 44	1.159	858	2.017
10	45 – 49	923	744	1.667
11	50 – 54	744	539	1.283
12	55 – 59	529	373	902
13	60 – 64	346	254	600
14	65 – 69	211	152	363
15	70 – 74	166	112	278
16	> 75	124	113	237
<b>Jumlah</b>		<b>13.656</b>	<b>11.928</b>	<b>25.584</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

## 16. Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar Rp. 725.321.032.000,- yang berasal dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 13.088.205.000; 2) Dana Perimbangan Rp. 657.376.952.000; dan 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 54.855.874.000 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021). Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pendapatan tersebut meningkat 14,63% dibanding tahun 2017 dan 0,36% dibanding tahun 2019. Namun bila dicermati maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung sangat kecil dan cenderung menurun. Nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 adalah Rp. 13.088.205.000,- menurun 49,63% dibanding tahun 2017 dan menurun 35,55% dibanding tahun 2019. Hal ini sangat mengkuatirkan karena Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali pendapatannya. Akan lebih mengkuatirkan lagi ketika dirinci dari komponen Pendapatan Asli Daerah, yaitu kontribusi dari pajak dan retribusi hanya Rp. 4.354.766.000,- atau 33,27 % dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung. Untuk itu upaya menggali Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan misalnya dengan mendirikan atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi, menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan lain-lain. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17.** Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2016 – 2020

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>21.900.202</b>	<b>25.983851</b>	<b>18.727.016</b>	<b>20.308.596</b>	<b>13.088.205</b>

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

1.1	<b>Pajak Daerah</b>	2.228.144	6.230.005	2.770.234	.618.913	3.382.401
1.2	<b>Retribusi Daerah</b>	272.166	488.015	519.386	503.244	972.365
1.3	<b>Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	6.376.331	8 362 321	7.520.159	7.087.059	4.029.893
1.4	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	13.023.560	10.903.510	7.917.236	9.099.310	4.703.545
<b>2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>671.580.900</b>	<b>537.625.621</b>	<b>548.108.271</b>	<b>662.052.696</b>	<b>657.376.952</b>
2.1	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	-	19.359.835	18.452.250	20.141.064	-
2.2	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	-	123.679.932	94.618.095	135.717.946	-
2.3	<b>Dana Alokasi Umum</b>	-	350.962.437	394.725.005	417.103.576	412.379.208
2.4	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	-	43.623.417	40.312.921	48.712.800	69.181.367
2.5	<b>Dana Alokasi Desa</b>	-	-	-	40.377.310	42.109.006
<b>3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>53.017.946</b>	<b>69.154.138</b>	<b>57.939.581</b>	<b>40.348.120</b>	<b>54.855.874</b>
3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	-	-	-	-	-
3.2	<b>Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-
3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	15.061.682	14.523.149	12.114.814	17.540.810	18.884.969
3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.5	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.6	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	10.589.000	31.478.990	3.562.000	3.277.500	4.303.661
3.7	<b>Lainnya</b>	437.104	23.152.000	5.220.115	16.131.997	1.283.197
	<b>Jumlah</b>	<b>746.499.047</b>	<b>632.763.610</b>	<b>624.774.868</b>	<b>722.709.412</b>	<b>725.321.032</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung 2021

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 sebesar Rp. 749.084.847.000,- menurun 9,84% dibanding tahun 2017 namun meningkat 22,67% dan 3,72% masing-masing dibanding tahun 2018 dan 2019 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021). Jika dibandingkan realisasi Pendapatan dengan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maka untuk tahun 2020 terjadi lebih banyak Belanja dibandingkan pendapatan. Bila dihitung, terjadi defisit sebesar Rp. 23.763.015.000,- atau 3,28%.

Bila dirinci maka belanja tidak langsung dalam empat tahun terakhir terus meningkat. Realisasi Belanja tidak langsung tahun 2020 adalah

365.634.073.000,- meningkat 17,24% dibanding 2019 dan 33,52% dibanding 2017. Sedang untuk belanja langsung dalam periode waktu yang sama bersifat fluktuatif namun cenderung menurun. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18.** Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Belanja (Ribuan Rupiah), 2016–2020

<b>Jenis Belanja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.562.000</b>	<b>274.842.813</b>	<b>303.650.193</b>	<b>311.871.444</b>	<b>365.634.073</b>
1.1 Belanja Pegawai	-	197.101.869	213.240.968	193.533.476	237.692.671
1.2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4 Belanja Hibah	19.768.000	14.221.900	7.736.700	15.247.450	31.021.402
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.794.000	1.682.835	1.277.922	1.284.661	1.297.663
1.6 Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	-	60.836.210	81.394.602	101.805.857	95.622.336
1.8 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>846.853.202</b>	<b>557.002.174</b>	<b>305.995.706</b>	<b>410.347.008</b>	<b>375.449.973</b>
2.1 Belanja Pegawai	209.394.772	29.240.441	23.203.520	25.216.100	20.876.498
2.2 Belanja Barang dan Jasa	218.810.165	152.392.918	130.521.635	184.448.698	171.881.385
2.3 Barang Belanja Modal	418.657.319	375.368.815	152.270.551	200.682.210	182.692.089
<b>Jumlah</b>	<b>868.415.202</b>	<b>830.844.988</b>	<b>609.645.899</b>	<b>722.218.452</b>	<b>741.084.047</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung 2021

## 17. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten ini tahun 2020 mencapai Rp. 5.750,83 Milyar meningkat 2,55 % dibanding tahun 2019 dan 26,80 % dibanding tahun 2016. Bila dilihat dari masing-masing lapangan usaha maka tiga lapangan usaha yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian dan 3) Konstruksi merupakan lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Tana Tidung. Peran ketiga lapangan usaha tersebut dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 78,35 % (Tabel 2.19).

**Tabel 2.19.** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (Milyar Rupiah), 2016-2020

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.524,29	1.537,86	1.624,61	1.733,86	1.788,45
B. Pertambangan dan Penggalian	1.061,30	1.428,69	1.568,20	1.744,21	1.693,89
C. Industri Pengolahan	100,76	108,94	114,08	121,68	124,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,72	0,78	0,86	1,09

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,57	0,63	0,68	0,73	0,82
F. Konstruksi	698,74	767,35	858,52	934,75	1.023,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199,27	228,72	250,84	276,30	291,99
H. Transportasi dan Pergudangan	32,14	35,57	39,00	42,59	43,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	10,13	11,19	12,20	12,42
J. Informasi dan Komunikasi	1,50	1,62	1,72	1,93	2,21
K. Jasa Keuangan	4,30	4,71	5,20	5,46	5,66
L. Real Estate	27,69	29,92	32,81	35,63	37,22
M.N. Jasa Perusahaan	0,77	0,81	0,85	0,89	0,90
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	463,35	506,90	538,35	584,26	606,30
P. Jasa Pendidikan	64,76	69,33	75,81	83,46	92,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,86	3,02	3,23	3,49	4,05
R.S.T.U. Jasa Lainnya	17,78	18,84	19,72	21,35	23,38
<b>Jumlah</b>	<b>4.209,73</b>	<b>4.753,74</b>	<b>5.145,59</b>	<b>5.603,65</b>	<b>5.750,83</b>

\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara  
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 adalah Rp 3.648 Milyar meningkat dibanding tahun 2016 s/d 2018 namun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Tana Tidung pada 2016 s/d 2020 juga didominasi oleh tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian dan konstruksi. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2020 mencapai 78,31 % (Tabel 2.20).

**Tabel 2.20.** PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tana Tidung (milyar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	1.061,72	1.062,62	1.093,61	1.121,51	1.125,00
B. Pertambangan dan Penggalian	1.055,45	1.127,66	1.159,32	1.223,96	1.162,33
C. Industri Pengolahan	77,62	79,85	80,84	83,01	80,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,57	0,61	0,63	0,71
E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,51	0,53	0,55	0,56	0,59
F. Konstruksi	474,98	499,24	528,77	553,30	570,00
G. Perdagangan Besar dan	145,46	154,56	160,13	172,00	177,29

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung  
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	24,47	26,05	27,42	28,43	28,10
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,83	7,24	7,54	7,51
J. Informasi dan Komunikasi	1,27	1,31	1,34	1,39	1,48
K. Jasa Keuangan	3,47	3,57	3,80	3,92	4,02
L. Real Estate	20,81	21,46	22,52	23,30	23,69
M.N. Jasa Perusahaan	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	334,80	349,21	365,01	381,40	389,66
P. Jasa Pendidikan	48,67	50,98	53,90	56,17	57,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,42	2,54	2,63	2,85
R.S.T.U. Jasa Lainnya	13,66	14,38	15,00	15,53	16,22
<b>Jumlah</b>	<b>3.272,72</b>	<b>3.401,83</b>	<b>3.523,21</b>	<b>3.675,91</b>	<b>3.648,68</b>

*\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara  
Sumber : BPS, Kab. Tana Tidung, 2017 – 2021*

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan harga konstan 2010 sangat berfluktuatif. Beberapa lapangan usaha terus tumbuh positif walau dengan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun khususnya pada tahun 2020. Lapangan usaha tersebut antara lain : 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) Konstruksi, 3) Jasa keuangan, 4) Real estate dan 5) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Bahkan ada beberapa lapangan usaha yang sejak tahun 2016 s/d 2019 tumbuh positif pada tahun 2020 menjadi pertumbuhannya negatif, contohnya : 1) Pertambangan dan penggalian, 2) Industri pengolahan, 3) Transportasi dan pergudangan, 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum dan 5) Jasa perusahaan. Sebaliknya ada beberapa lapangan usaha yang tumbuh signifikan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, yaitu : 1) Pengadaan listrik dan gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 3) Informasi dan komunikasi, 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan 5) Jasa lainnya.

Perkembangan PDRB khususnya atas dasar harga konstan diantaranya sangat dipengaruhi kondisi adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk di Kabupaten Tana Tidung. Beberapa lapangan usaha yang terkait langsung dengan daya beli masyarakat seperti lapangan usaha industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan contoh lapangan usaha yang mendapat pengaruh negatif karena adanya pandemic covid 19. Kondisi sebaliknya terjadi pada lapangan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami peningkatan cukup besar sehubungan dengan banyaknya aktifitas dalam bidang kesehatan disaat kondisi pandemi covid 19. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (%), 2017–2020

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,77	0,09	2,92	2,55	0,31
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,83	6,84	2,81	5,58	-5,3
C. Industri Pengolahan	5,67	2,88	1,25	2,68	-2,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,62	6,03	7,47	4,12	12,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,50	3,68	3,88	2,89	5,75
F. Konstruksi	9,40	5,11	5,92	4,64	3,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,29	6,29	3,60	7,41	3,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1,54	6,48	5,24	3,69	-1,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	6,93	6,02	4,17	-0,37
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	3,22	2,53	3,99	6,52
K. Jasa Keuangan	5,03	2,84	6,37	3,12	2,64
L. Real Estate	2,46	3,14	4,95	3,45	1,67
M.N. Jasa Perusahaan	1,27	1,39	1,28	1,51	-0,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	4,31	3,52	4,49	2,16
P. Jasa Pendidikan	4,28	4,75	5,74	4,22	3,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,50	3,28	5,22	3,30	8,48
R.S.T.U. Jasa Lainnya	5,76	5,28	4,29	3,53	4,44
<b>Jumlah</b>	<b>1,10</b>	<b>3,94</b>	<b>3,57</b>	<b>4,33</b>	<b>-0,74</b>

\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara  
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 – 2021

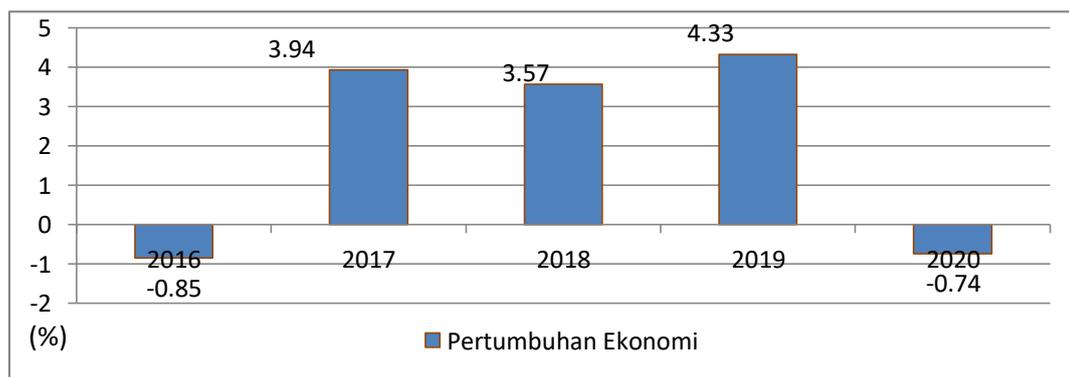
## 18. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 - 2020 rata-rata tumbuh 2,05 %. Bila dicermati secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 hingga 2019 tumbuh sekitar 3,57 - 4,33 %, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0,74%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.22

**Tabel 2.22.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Harga Konstan (Milyar Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2016	3.272,72	-0,85

2017	3.401,83	3,94
2018	3.523.21	3,57
2019	3.675,91	4,33
2020	3.648,68	-0,74
Rata – Rata		<b>2,05</b>



**Gambar 2.2.** Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020

## 19. Jalan

Keberadaan jalan sangat penting dalam rangka mobilitas orang dan barang sehingga sangat berperan dalam mendukung sektor-sektor lainnya termasuk diantaranya sektor perekonomian. Sampai tahun 2020, Kabupaten Tana Tidung mempunyai jalan sepanjang 324.37 km. Panjang jalan tersebut sama dengan panjang jalan tahun 2018 dan 2019, yang berarti selama tiga tahun terakhir tidak ada penambahan panjang jalan (Tabel 2.23).

**Tabel 2.23.** Panjang Jalan<sup>1</sup> Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (km). 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Negara	-	-	-
Provinsi	-	-	-
Kabupaten/Kota	324,37	324,37	324,37
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

*Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.248/KPTS/M/2015  
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021*

Walaupun tidak terjadi penambahan panjang jalan di Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2018, namun dari sisi jenis permukaan jalannya terjadi

peningkatan jalan kerikil sebaliknya panjang jalan yang mempunyai permukaan tanah mengalami penurunan. Hal ini berarti terjadi perubahan jalan yang semula mempunyai permukaan tanah menjadi jalan berkerikil. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka terjadi peningkatan jalan kerikil sebesar 23,64 % (Tabel 2.24)

**Tabel 2.24.** Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

<b>Jenis Permukaan Jalan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aspal	166,17	166,17	166,17
Kerikil	59,48	73,54	73,54
Tanah	97,21	83,16	83,16
Lainnya	1,50	1,50	1,50
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Kondisi jalan di Kabupaten Tana Tidung masih banyak memerlukan perhatian khususnya dalam hal kualitas jalannya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya jalan yang tergolong rusak berat. Sebagai contoh tahun 2020, terdapat jalan sepanjang 103,00 km yang tergolong rusak berat yang berarti sekitar 31,75% dari panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung dalam kondisi rusak berat. Bila ditambah dengan kondisi jalan yang rusak maka hampir separo jalan di Kabupaten Tana Tidung dalam kondisi rusak berat dan berat (Tabel 2.25).

**Tabel 2.25.** Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

<b>Kondisi Jalan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Baik	151,58	149,87	149,87
Sedang	19,90	22,70	22,70
Rusak	31,56	48,80	48,80
Rusak Berat	121,34	103,00	103,00
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

## **20. Pertanian**

### **a. Sayuran dan Buah-Buahan Semusim**

Berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan semusim dibudidayakan di Kabupaten Tana Tidung. Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tersebut berfluktuatif. Pada tahun 2020 dihasilkan sayuran dan buah-buahan semusim sebanyak 2.708 kw terdiri dari 2.017 kw sayuran dan 691 buah-buahan semusim. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim tersebut meningkat 15,86% dibanding 2019 dan 88,58% dibanding tahun 2018, namun menurun 24,69% dibanding

tahun 2017. Beberapa komoditas sayuran yang banyak dikembangkan adalah Cabe Rawit, Kangkung, Bayam, Kacang Panjang dan Petsai, sedang untuk buah-buahan semusim adalah Tomat dan Terung. Komoditas lainnya dibudidayakan dalam skala luasan yang lebih kecil, bahkan beberapa diantaranya tidak dibudidayakan di Kabupaten Tana Tidung. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26.** Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Tana Tidung, 2017-2020

No	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020
<b>Sayuran</b>					
1	Bawang Daun	30	3	34	20
2	Bawang Merah	-	-	-	-
3	Bawang Putih			-	-
4	Bayam	480	366	301	296
5	Buncis	25	3	-	3
6	Cabai Besar	201	5	-	14
7	Cabai Rawit	1.009	199	556	745
8	Kacang Panjang	215	53	281	255
9	Kangkung	462	337	375	469
10	Kentang	-	-	-	-
11	Ketimun	85	28	29	39
12	Kubis	-	-	-	-
13	Petsai	23	214	236	176
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.530</b>	<b>1.208</b>	<b>1.812</b>	<b>2.017</b>
<b>Buah-Buahan Semusim</b>					
1	Semangka	-	-	-	10
2	Terung	499	81	259	331
3	Tomat	567	147	266	350
	<b>Jumlah</b>	<b>1.066</b>	<b>228</b>	<b>525</b>	<b>691</b>
	<b>Total</b>	<b>3.596</b>	<b>1.436</b>	<b>2.337</b>	<b>2.708</b>

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung, 2021

#### **b. Tanaman Biofarmaka**

Luas panen tanaman biofarmaka di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 adalah 486 m<sup>2</sup> menurun drastis bila dibanding luas tanam tahun 2018 dan 2019. Luas tanam tersebut menurun 105,97% dibanding tahun 2018 dan 131,48 % dibanding 2019. Untuk Produksi, tahun 2020 dihasilkan 1.798 kg, meningkat 51,99% dibanding tahun 2018 tetapi menurun 28,14% dibanding tahun 2019 (Tabel 2.27).

Berdasarkan data luas tanam dan produksi tanaman biofarmaka, pengembangan tanaman berkhasiat obat ini di Kabupaten Tana Tidung masih sangat terbatas, padahal disaat pandemi covid-19 seperti sekarang ini kebutuhan akan produk tanaman biofarmaka meningkat karena banyak

menggunakan atau meminimalkan produk tanaman biofarmaka untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

**Tabel 2.27.** Luas Panen dan Produksi Biofarmaka di Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (m <sup>2</sup> )			Produksi (kg)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Jahe	315	306	117	293	672	472
2.	Laos/Lengkuas	300	269	133	383	484	459
3.	Kencur	124	82	35	128	206	94
4.	Kunyit	252	162	84	369	468	301
5.	Lempuyang	10	306	117	10	672	472
Jumlah		<b>1.001</b>	<b>1.125</b>	<b>486</b>	<b>1.183</b>	<b>2.502</b>	<b>1.798</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung , 2020 dan 2021

### c. Tanaman Buah-Buahan

Produksi buah-buahan di Kabupaten Tana Tidung dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020, dihasilkan 58.406 ton buah-buahan, meningkat 751,03% dibanding tahun 2018 dan 162,57% dibanding tahun 2019. Bila dirinci untuk masing-masing komoditas maka pada tahun 2020 terdapat beberapa jenis buah-buahan yang produksinya cukup menonjol yaitu : Nangka 5.681 ton, Mangga 5.260 ton, Pisang 3.704 ton, Duku 3.263 ton, Rambutan 2.284 ton, Durian 1.465 ton dan Pepaya 1.247 ton (Tabel 2.28).

**Tabel 2.28.** Produksi Buah-buahan Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020

No.	Jenis Tanaman	Produksi (ton)		
		2018	2019	2020
1.	Mangga	459	2.239	5.260
2.	Durian	-	1.855	1.465
3.	Pisang	1.262	2.037	3.704
4.	Pepaya	688	1.430	1.247
5.	Salak	14	49	38
6.	Alpukat	5	8	46
7.	Belimbing	16	28	325
8.	Duku	562	2.733	3.263
9.	Jambu	21	43	193
10.	Jengkol	4	25	65
11.	Jeruk Besar	26	64	423
12.	Jeruk Siam	170	266	316
13.	Manggis	1	8	61
14.	Melinjo	20	30	21
15.	Nangka	1.715	4.987	5.681
16.	Nenas	240	414	767
18.	Petai	118	96	137

19.	Rambutan	398	2.186	2.284
20.	Sawo	20	39	56
21.	Sirsak	9	27	102
22.	Sukun	29	64	50
<b>Jumlah</b>		<b>6.863</b>	<b>22.244</b>	<b>58.406</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung , 2020 dan 2021

**d. Tanaman Perkebunan**

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat selama periode tahun 2018 s/d 2020. Pada tahun 2020, luas areal tanaman perkebunan 656,35 ha, meningkat 1,68 ha (0,26%) dibanding tahun 2019 dan 17,09 (2,67%) dibanding tahun 2018. Walaupun demikian, peningkatan areal tanaman perkebunan tersebut tidak signifikan (sangat rendah) yang disebabkan terbatasnya lahan yang bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian termasuk budidaya tanaman perkebunan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya lahan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak ditanam, sebagai contoh tahun 2020 areal tanaman kelapa sawit seluas 486,10 ha yang berarti 74,06 % dari luas tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung. Tanaman yang paling sedikit dibudidayakan adalah Kakao yang hanya ditanam seluas 0,25 ha. Sedang dua tanaman lainnya yaitu Teh dan Tembakau tidak ada di tanam di Kabupaten Tana Tidung karena memang kondisi iklim di Tana Tidung tidak cocok dengan persyaratan tumbuh kedua komoditas tersebut, yang menghendaki suhu rendah sehingga umumnya cocok ditanam di daerah dataran tinggi.

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebanyak 410,50 ton meningkat dibanding tahun 2018 namun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Seperti halnya luas areal tanam, produksi perkebunan juga didominasi Kelapa Sawit yang mencapai 97,89% dari produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

Nampaknya data luas tanam dan produksi tanaman perkebunan ini merupakan perkebunan rakyat, dan belum termasuk perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan besar swasta.

**Tabel 2.29.** Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, 2018 -2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)			Produksi (ton)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Kelapa Sawit	473,01	486,01	486,10	333,03	408,61	401,85
2.	Kelapa	19,50	25,91	25,50	3,60	5,10	5,00
3.	Karet	91,00	89,00	89,00	-	-	0,40
4.	Kopi	14,50	12,50	12,50	1,52	1,78	1,75
5.	Kakao	0,25	0,25	0,25	-	-	-
6.	Lada	41,00	41,00	43,00	1,00	2,69	1,50
7.	Teh	-	-	-	-	-	-

8	Tembakau	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>639,26</b>	<b>654,67</b>	<b>656,35</b>	<b>339,15</b>	<b>418,18</b>	<b>410,50</b>

*Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2020 dan 2021*

## **21. Industri Kecil dan Menengah**

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 sebanyak 281 IKM. Dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 s/d 2020 jumlah IKM di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat. Jumlah IKM tersebut meningkat 15,16% dibanding tahun 2019 dan meningkat 100,71% dibanding tahun 2016. Artinya dalam jangka waktu lima tahun terjadi peningkatan jumlah IKM lebih dari dua kali lipat.

Jenis-jenis IKM yang banyak dikembangkan masyarakat Kabupaten Tana Tidung antara lain : 1) Pangan, 2) Kerajinan, 3) Galian bukan loga, 4) Air isi ulang, 5) Furniture, 6) Sandang dan 7) Barang dari kayu.

Lokasi IKM tersebar pada seluruh kecamatan, namun yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 104 IKM atau 37,01%. Data jumlah IKM beserta sebarannya di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30.** Sebaran Jumlah IKM di Kabupaten Tana Tidung , 2020

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah IKM</b>	<b>Prosentase</b>
1.	Sesayap	104	37,01
2.	Sesayap Hilir	71	25,28
3.	Betayau	43	15,31
4.	Muruk Rian	31	11,03
5.	Tana Lia	32	11,39
<b>Jumlah</b>		<b>281</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Disperindakop & UKM Kab. Tana Tidung, 2021*